



## PENGARUH SEKTOR AGRIKULTUR DAN NILAI KURS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN VARIABEL MODERASI PENGENDALIAN KORUPSI DI NEGARA BRICS

Michael Kusuma<sup>1)</sup>, Suparna Wijaya<sup>2)\*</sup>

1) [4122220008\\_michael@pknstan.ac.id](mailto:4122220008_michael@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

2) [suparnawijaya@upnvi.ac.id](mailto:suparnawijaya@upnvi.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This study aims to examine the effect of the agricultural sector and exchange rates on tax revenues in the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa). The variables used are the value of the agricultural sector's contribution, the exchange rate, the corruption control index and the ratio of tax revenues. Data sourced from World Bank Data for the period 2011 - 2019. The statistical method used is the quantitative method with multiple linear regression with panel data. Based on panel model testing, the Random Effect Model is the best model to use. Simultaneously, all variables affect the ratio of tax revenues. Partially, agriculture has a significant negative effect on tax revenues while the exchange rate and corruption control index have a significant positive effect on the ratio of tax revenues. The results of this study are expected to provide insight to the BRICS countries to be able to adopt policies in optimizing tax revenues through the agricultural sector, exchange rates and controlling corruption.*

**Keywords:** Agriculture, Control of Corruption, Exchange Rates, Taxes.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sektor agrikultur dan nilai kurs terhadap penerimaan pajak di negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan). Adapun variabel yang digunakan adalah nilai kontribusi sektor agrikultur, nilai kurs, indeks pengendalian korupsi dan rasio penerimaan pajak. Data bersumber dari *World Bank Data* periode 2011 - 2019. Metode statistik yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dengan data panel. Berdasarkan pengujian model panel, *Random Effect Model* merupakan model yang terbaik untuk digunakan. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap rasio penerimaan pajak. Secara parsial, agrikultur berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak sedangkan nilai tukar dan indeks pengendalian korupsi berpengaruh signifikan positif terhadap rasio penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada negara BRICS untuk dapat mengambil kebijakan dalam mengoptimisasi penerimaan pajak melalui sektor agrikultur, nilai kurs dan pengendalian korupsi.

**Kata Kunci:** Agrikultur, Nilai Kurs, Pengendalian Korupsi, Pajak.

### PENDAHULUAN

Goldman Sachs, sebuah perusahaan bank investasi multinasional asal Amerika Serikat, menerbitkan sebuah laporan riset ekonomi yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang mungkin hanya dua dari enam ekonomi terbesar di dunia dan hanya akan tetap berada pada peringkat tersebut (O'Neill et al, 2005). Dalam proyeksi ekonomi sampai dengan tahun 2050, ekonomi gabungan negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) mampu untuk menjadi lebih besar dibandingkan ekonomi gabungan negara G6 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Italia dan Inggris). Jika kondisi perekonomian di negara BRICS dapat berjalan dengan baik, maka proyeksi ini dapat terwujud. Hal ini dikarenakan pertumbuhan rata-rata ekonomi di negara BRICS mampu untuk melebihi 5% per tahun.



Gambar 1. Proyeksi ekonomi di beberapa negara pada tahun 2025.

Country (indices with US=100)	Projected relative size of economies (US=100) 2005–2050			
	GDP at market exchange rates in USD terms		GDP in PPP terms	
	2005	2050	2005	2050
US	100	100	100	100
Japan	39	23	32	23
Germany	23	15	20	15
China	18	94	76	143
UK	18	15	16	15
France	17	13	15	13
Italy	14	10	14	10
Spain	9	8	9	8
Canada	8	9	9	9
India	6	58	30	100
Korea	6	8	9	8
Mexico	6	17	9	17
Australia	5	6	5	6
Brazil	5	20	13	25
Russia	5	13	12	14
Turkey	3	10	5	10
Indonesia	2	19	7	19

Sumber: Hawksworth (2006, p. 5). *The World in 2050*. PriceWaterhouseCoopers.

Mengumpulkan pajak merupakan kegiatan mendasar bagi suatu negara untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur dan penyediaan layanan bagi warga negara (Prasetyowati, 2022). Pajak memiliki peran kunci dalam membuat pertumbuhan berkelanjutan terutama dalam hal terjadi krisis ekonomi. Banyak negara masih berjuang untuk mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pembangunan mereka sendiri. *World Bank* (2023) menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki rasio pajak kurang dari 15% dari PDB harus meningkatkan pengumpulan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar negara. Mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak akan mempermudah negara dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal.

Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) merupakan sebuah indikator untuk mengukur bagaimana kapasitas pemungutan pajak dalam perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, rasio pajak dapat mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara. Rasio pajak di negara BRICS cenderung masih terbilang rendah dibandingkan negara-negara maju (Neog & Gaur, 2021). India dan Cina sebagai pemain baru dalam ekonomi global mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang potensial dalam dekade terakhir. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, suatu negara membutuhkan kinerja penerimaan pajak yang mumpuni.

Di negara gabungan BRICS yang anggotanya merupakan negara berkembang, perekonomian negara tersebut bergantung pada sektor agrikultur dan sektor produk primer lainnya. Brazil merupakan salah satu contoh negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa seperti hasil hutan, kebun kedelai dan kopi. Berdasarkan *Economic Research Service* (2017) menyatakan bahwa negara berkembang dengan kategori *middle-income* berkontribusi dalam memproduksi hasil sektor agrikultur sekitar 40 persen hasil produksi global dengan pertumbuhan lebih dari 3,5 persen tiap tahunnya. *World Bank* (2023) menyatakan bahwa sektor agrikultur memiliki potensi untuk memberantas kemiskinan ekstrem serta menyejahterakan masyarakat pada tahun 2050 karena dinilai mampu meningkatkan penghasilan masyarakat miskin hingga empat kali lipat dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, kontribusi sektor agrikultur terhadap PDB bahkan mencapai lebih dari 25 persen di negara berkembang.



Walaupun kontribusi dan potensi sektor agrikultur sangat positif terhadap perekonomian negara khususnya negara berkembang, ternyata hasil penelitian terkait kontribusi sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak menyatakan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Gupta, 2007), (Gaalya, 2015) dan (Rodriguez, 2018) menyatakan bahwa sektor agrikultur berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan (Imam, 2010) menyatakan sektor agrikultur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Lebih lanjut, penelitian tersebut belum dilakukan terhadap negara BRICS dan bahkan belum ada penelitian yang menggunakan pengendalian korupsi sebagai variabel moderasinya.

Sebagaimana nilai kurs, tingkat pengendalian korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Korupsi masih menjadi salah satu kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Attila (2008) dan Tanzi & Davoodi (2000) membuktikan bahwa akibat korupsi yang tinggi, kinerja pajak negara berkembang menjadi sangat rendah. Ini juga berlaku untuk kasus ekonomi BRICS di mana rasio pajak terhadap PDB jauh lebih rendah daripada negara-negara maju.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh antara kontribusi sektor agrikultur dan nilai kurs terhadap penerimaan pajak di negara BRICS dalam periode observasi tahun 2011-2019. Kemudian, untuk memperdalam hasil analisis, peneliti juga menambahkan variabel moderasi berupa tingkat pengendalian korupsi. Dengan tingginya tingkat korupsi maka potensi basis pajak di masa depan akan berkurang. Sebagaimana hasil dari penelitian Arif & Rawat (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengendalian korupsi maka semakin tinggi penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada negara BRICS untuk dapat mengambil kebijakan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak melalui sektor agrikultur, nilai kurs dan pengendalian korupsi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Perpajakan**

*OECD* (2023) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai penerimaan yang diperoleh oleh suatu negara dari wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan atas penghasilan dan laba, pajak atas barang dan jasa, *pajak payroll*, pajak atas kepemilikan dan pengalihan properti, pajak atas dividen atau royalti dan pajak lainnya. Umumnya, penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Pajak atas penghasilan dan laba meliputi pajak yang dikenakan atas penghasilan atau keuntungan (penghasilan bruto dikurangi pengurang pajak yang dapat dikurangkan) orang pribadi dan badan, termasuk hasil perjudian. Pajak atas barang dan jasa meliputi semua pajak yang dikenakan atas kegiatan produksi, ekstraksi, penjualan, *transfer*, *leasing* atau pengiriman barang, penyerahan jasa, dan penggunaan barang atau izin penggunaan barang atau izin untuk melakukan sesuatu. Pajak *payroll* adalah pajak yang meliputi pajak jaminan sosial, pajak pengangguran, pajak untuk perawatan medis, dsb. Pajak *payroll* tersebut dibayar oleh karyawan ataupun pemberi kerja. Pajak properti merupakan pajak yang dibayarkan atas lahan dan bangunan yang diperjualbelikan ataupun disewakan.

Smith (2023) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam perpajakan, diantaranya prinsip proporsionalitas, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan, dan prinsip efisiensi. Pertama, prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan tidak memberatkan wajib pajak. Kedua, prinsip kepastian menyatakan bahwa waktu pembayaran, cara pembayaran, serta jumlah pajak yang dibayarkan harus jelas bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian prosedur pembayaran pajak yang jelas. Ketiga, prinsip kenyamanan yang menjelaskan bahwa pajak harus dikenakan di saat wajib pajak merasa nyaman untuk membayarnya. Hal ini bertujuan agar wajib



pajak melaksanakan pembayaran pajak dengan sukarela. Terakhir, prinsip efisiensi menyatakan bahwa sistem penerimaan pajak yang dilaksanakan harus dibuat sedemikian rupa agar jumlah pajak yang terkumpul mendapatkan hasil yang optimal.

Pengumpulan penerimaan melalui pajak merupakan kegiatan fundamental bagi suatu negara untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur dan penyediaan layanan bagi warga negara (Prasetyowati, 2022). Pajak memiliki peran penting dalam menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama dalam hal penanganan saat terjadi krisis ekonomi. Negara yang masih berjuang untuk mengumpulkan pendapatan yang cukup dalam membiayai pembangunan negara mereka sendiri terbilang cukup banyak. *World Bank* (2023) menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki rasio pajak kurang dari 15% dari PDB harus meningkatkan pengumpulan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar negara. Mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak akan mempermudah negara dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal.

Penerimaan pajak di berbagai negara memiliki komposisi yang berbeda-beda tergantung dari jenis pajak yang dikenakan. *World Bank* (2023) merilis data penerimaan pajak (dalam pesersentase terhadap Produk Domesti Bruto/PDB) di seluruh negara berdasarkan definisi transfer wajib kepada pemerintah pusat untuk kepentingan umum seperti denda, penalti, dan sebagian besar kontribusi jaminan sosial tidak termasuk, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan koreksi kekeliruan pembayaran pajak dicatat sebagai pendapatan negatif. Selain itu, besarnya persentase penerimaan pajak terhadap PDB mengindikasikan output sebuah negara yang ditarik kontribusinya dari wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan oleh pemerintah melalui pajak (*OECD*, 2023). Sehingga dapat dikatakan bahwa persentase penerimaan pajak terhadap PDB merupakan sebuah indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan sumber daya ekonomi yang dimiliki.

Eurostat (2023) menyatakan bahwa penerimaan pajak di setiap negara dari tahun ke tahun selalu beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh perubahan aktivitas ekonomi di negara tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada transaksi penjualan barang dan/atau jasa, perubahan jumlah tenaga kerja, perubahan jumlah pabrik yang beroperasi dan sebagainya. Selain itu, perubahan pada peraturan perpajakan seperti tarif pajak, objek pajak, *exemptions*, fasilitas pajak, dan lain sebagainya dapat memengaruhi penerimaan pajak dan produk domestik bruto. Prasetyowati (2022) menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan yang mumpuni akan mempengaruhi penerimaan pajak. Teknologi informasi dapat memberikan sisi positif dan negatif terhadap penerimaan pajak tergantung bagaimana suatu negara memanfaatkan peluang dari teknologi informasi tersebut. Sisi negatifnya adalah jika pemerintah tidak dapat memaksimalkan potensi teknologi informasi, maka pemerintah akan kehilangan potensi pajak dari segi *e-commerce*. Sedangkan sisi positifnya adalah teknologi informasi mampu membantu pemerintah dalam memperluas basis pajak serta percepatan pelayanan sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak. Selain faktor teknologi informasi, reformasi perpajakan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak. Reformasi perpajakan membutuhkan komitmen sosial dan politik yang kuat serta strategi perpajakan yang lebih jelas. (Akitoby, 2014).

### **Teori Kontribusi Sektor Agrikultur**

Akibat tren globalisasi, jumlah masyarakat yang bekerja di sektor agrikultur semakin berkurang. Asai & Malgioglio (2019) menyatakan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor agrikultur lebih banyak dari masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan berpenghasilan tinggi atau dapat dikatakan bahwa sektor agrikultur lebih berkembang di negara dengan penduduk yang memiliki penghasilan rendah sebagaimana pernyataan dari *Economic Research Service* (2017) bahwa negara berkembang dengan kategori *middle-income* berkontribusi dalam



memproduksi hasil sektor agrikultur sekitar 40 persen hasil produksi global dengan pertumbuhan lebih dari 3,5 persen tiap tahunnya. Seperti negara Brazil dan India, hal penting dalam penentuan produktivitas agrikultur mereka berasal dari peningkatan kapasitas penelitian agrikultur secara nasional serta sistem ekstensi yang besar. Dalam hal ini, negara tersebut sangat memaksimalkan teknologi informasi dengan maksimal agar pekerjaan menjadi lebih mudah serta hasil yang didapatkan memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi. Namun McCampbell (2022) menyatakan bahwa biaya investasi yang tinggi, serta kurangnya kemampuan terkait pengetahuan digital dan lingkungan menyebabkan kendala dalam peningkatan produktivitas sektor agrikultur

Menurut Chelliah dkk. (1975), sektor agrikultur merupakan sektor yang sulit untuk dipajaki di negara berkembang. Hal ini dikarenakan lahan pertanian pada negara berkembang umumnya dimiliki oleh masyarakat dan merupakan sektor informal. Akibatnya, peningkatan sektor agrikultur berbanding terbalik dengan penerimaan pajak. Tanzi (1992) menambahkan bahwa penerimaan pajak semakin sulit untuk ditingkatkan seiring dengan peningkatan sektor agrikultur. Penelitian dari Ghura (1998) dan Gupta (2007) juga turut mendukung pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa sektor agrikultur berpengaruh secara negative terhadap penerimaan pajak. Kesulitan pelaksanaan perpajakan di sektor agrikultur juga dikarenakan tingginya biaya administratif otoritas pajak dalam mengatur dan mengawasi pertanian subsisten yang bersifat informal dibandingkan dengan potensi penerimaannya.

Sektor agrikultur di 42 negara di Afrika Sub Sahara selama tahun 2005 sampai dengan 2012 memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan sektor tersebut hanya digunakan untuk penghidupan pribadi atau keluarga daripada untuk tujuan komersial (Alabede, 2018). Kesulitan peningkatan penerimaan pajak dari sektor agrikultur dikarenakan sektor agrikultur merupakan sektor yang sulit untuk dipajaki karena beroperasi secara informal. Hal ini juga didukung dalam penelitian Castro & Camarillo (2014) bahwa sektor agrikultur memiliki hubungan negatif terhadap penerimaan pajak. Di negara berkembang dengan kategori *middle-income*, sektor agrikultur merupakan sektor yang sulit dipajaki karena produksinya cenderung memiliki skala yang kecil. Skala agrikultur yang kecil tersebut menyebabkan sedikitnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak penghasilan (Gaalya, 2015). Selain itu, adanya pengecualian dalam pengenaan pajak tidak langsung atas penghasilan dari sektor agrikultur yang bersifat subsisten pun juga mempengaruhi penerimaan pajak di negara tersebut (Rodriguez, 2018). Perlakuan pajak preferensial ini didasari atas risiko yang tinggi apabila hasil agrikultur tidak dikecualikan dari pengenaan pajak. Gaalya (2015) juga menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk verifikasi penghasilan yang sebenarnya dari sektor agrikultur lebih besar dibandingkannya penerimaan pajak yang diterima dari sektor tersebut. Hal-hal inilah yang kemudian membuat sebagian besar penelitian yang telah dilakukan menemukan adanya hubungan negatif antara agrikultur dan penerimaan pajak. Selain itu, Chaudhry & Farzana (2010) menyatakan bahwa sektor agrikultur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara Pakistan.

### **Teori Nilai Kurs**

Menurut FASB (*Financial Accounting Standard Board*) dalam Sukirno (2004) menyatakan bahwa nilai tukar adalah kurs antara satu unit mata uang suatu negara dengan sejumlah mata uang negara lainnya yang dapat dipertukarkan pada waktu tertentu. Todaro (2004) menyatakan bahwa nilai tukar suatu mata uang adalah suatu nilai acuan dari bank sentral negara yang bersangkutan antara mata uang lokal dengan mata uang asing di pasar pertukaran. Sukirno (2004) menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang mewakili satu satuan mata uang nasional yang diperlukan untuk ditukarkan dengan satu satuan mata uang asing. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa nilai tukar atau nilai kurs adalah suatu nilai yang ditetapkan oleh suatu otoritas keuangan yang dijadikan



acuan untuk memperoleh satuan mata uang asing tertentu dengan menggunakan mata uang tertentu. Biasanya, nilai mata uang tertentu pada waktu tertentu ditetapkan oleh Bank Sentral negara yang bersangkutan. Selain itu, nilai kurs memiliki pengaruh penting dalam perekonomian terbuka terutama bagi neraca transaksi di suatu negara. Terdapat dua jenis nilai kurs, diantaranya:

1. Kurs Nominal

Merupakan harga relatif dari mata uang dua negara atau nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sebagai contoh nilai tukar antara dolar AS dan rupiah Indonesia adalah 10.000 rupiah per dolar, maka warga negara Indonesia dapat menukar satu dolar dengan 10.000 rupiah di pasar dunia untuk mata uang asing. Dalam kurs nominal, terdapat istilah apresiasi dan depresiasi. Apresiasi atau penguatan mata uang adalah peningkatan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli, sedangkan depresiasi atau pelemahan mata uang adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang dapat dibeli.

2. Kurs Riil

Merupakan harga relatif dari barang-barang diantara dua negara atau nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Kurs riil biasa juga disebut *terms of trade*. Sebagai contoh ketika membeli tas dengan harga di Amerika adalah 600 dolar sedangkan di Indonesia Rp2.000.000. Untuk perbandingan harga keduanya, maka harus mengubahnya menjadi mata uang umum, jika 1 dolar Rp10.000 maka harga tas di Amerika Rp6.000.000. Sehingga dalam membandingkan harga tas di Amerika dan Indonesia, dapat disimpulkan harga tas di Indonesia  $\frac{1}{3}$  harga dari harga tas di Amerika.

Sebagaimana diketahui, pembanguann ekonomi merupakan suatu pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah, dapat menyebabkan penerimaan pajak juga ikut rendah. Salah satu indikator untuk menjaga stabilitas ekonomi guna tercapainya pembangunan ekonomi ialah menjaga nilai kurs. Ketika nilai kurs mata uang suatu negara mengalami depresiasi, maka harga barang yang beredar dalam negeri cenderung mengalami peningkatan sedangkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan. Hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat akan berkurang. Kondisi inilah yang secara langsung dapat menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak karena perputaran ekonomi di dalam negeri mengalami penurunan (Wijaya & Asy'ari, 2023). Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai kurs pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama PPN karena pajak tersebut merupakan pajak atas konsumsi. Dalam penelitiannya, Feridawan (2015) menyatakan bahwa nilai kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini kemudian didukung oleh Imam (2010) dan Muibi & Sinbo (2015) yang berkesimpulan bahwa nilai kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak. Tetapi, Mispian (2018) menyatakan bahwa nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

### **Teori Pengendalian Korupsi**

World Bank (2023) mendefinisikan korupsi sebagai sebuah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ditinjau dari segi hukum, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Tindakan korupsi jika memenuhi beberapa unsur, diantaranya: penyalahgunaan wewenang atau fasilitas, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri maupun orang lain serta menimbulkan kerugian negara. Perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi ialah menerima gratifikasi, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya. Tindakan korupsi ini hamper terjadi di semua negara tanpa memperhatikan tingkatan sosialnya. Kasus korupsi sering kali terjadi saat terjadi kegiatan



pelayanan publik. Hal ini dikarenakan para pejabat memanfaatkan wewenang yang mereka miliki untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pada tatanan pemerintahan, korupsi juga mempersulit demokrasi dan menurunkan tata kelola pemerintahan. Banyak dampak negatif yang terjadi akibat korupsi.

Hasil penelitian Gupta (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi suatu negara, maka akan menurunkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan berkurangnya keinginan masyarakat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Korupsi masih menjadi salah satu kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Attila (2008) dan Tanzi & Davoodi (2000) membuktikan bahwa akibat korupsi yang tinggi, kinerja pajak negara berkembang menjadi sangat rendah. Terdapat beberapa penelitian lainnya yang menyatakan dampak negatif dari adanya praktik korupsi

Ada juga beberapa penelitian yang menemukan pengaruh korupsi terhadap penerimaan pajak. Tanzi dan Davoodi (2000) menemukan bahwa peningkatan korupsi satu poin dapat mengurangi rasio pajak langsung terhadap PDB lebih dari rasio pajak tidak langsung terhadap PDB. Selanjutnya Abed dan Gupta (2002) menyatakan bahwa ada korupsi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pajak langsung dan tidak langsung. Namun, pengaruhnya terhadap pajak langsung lebih intensif. Di sisi lain, Thornton (2008) menemukan bahwa efek korupsi terhadap berdampak pada pemungutan pajak barang dan jasa dalam negeri dan transaksi perdagangan internasional. Menurut Thornton (2008), upaya pemberantasan korupsi pemungutan pajak harus fokus pada pajak tidak langsung. Menurut Mahdavi (2008) korupsi dalam penetapan dan pemungutan pajak cenderung menjadi masalah yang lebih serius ketika basis pajak lebih sulit untuk diamati atau dalam kasus ketika pembayar pajak dapat menegosiasikan pembayaran pajak dengan pajak administrator.

**Hasil Penelitian Terdahulu**

Tabel 1 menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap penerimaan pajak.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyuma, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.	Mispiyanti dan Ika Neni Kristanti. 2018	Variabel Independen Nilai Kurs  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Nilai Kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
2	Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2005–2014)	Ferdiawan. M. A. 2015	Variabel Independen Nilai Kurs  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Nilai Kurs berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
3	<i>Macroeconomic Determinants of Tax</i>	Muibi, S.O. & Sinbo, O. 2013	Variabel Independen Nilai Kurs	Nilai Kurs berpengaruh signifikan negatif



	<i>Revenue in Nigeria (1970-2011)</i>		Variabel Dependen Penerimaan Pajak	terhadap penerimaan pajak
4	<i>Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan</i>	Imran Sharif Chaudhry dan Farzana Munir. 2010.	Variabel Independen Nilai Kurs dan Agrikultur  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	1. Agrikultur tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 2. Nilai Kurs berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak
5	<i>Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries</i>	Gupta, Abhijit Sen. 2007.	Variabel Independen Agrikultur dan Indeks Korupsi  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	1. Agrikultur berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak 2. Indeks korupsi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak
6	<i>Tax determinants revisited. An unbalanced data panel analysis</i>	Rodriguez, C.V.M. 2018	Variabel Independen Agrikultur  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Agrikultur berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak
7	<i>Effect of Corruption on Tax Revenue in the OECD and Latin America Countries</i>	Hunady, J. & Orviska, M. (2015)	Variabel Independen Indeks Korupsi  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Indeks persepsi korupsi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak
8	<i>Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries</i>	Arif, I. & Rawat, A. S. (2018)	Variabel Independen Indeks Pengendalian Korupsi  Variabel Dependen Penerimaan Pajak	Indeks persepsi korupsi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Sektor agrikultur berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak



- H<sub>2</sub> : Nilai kurs berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak
- H<sub>3</sub> : Pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
- H<sub>4</sub> : Pengendalian korupsi memperkuat pengaruh sektor agrikultur terhadap penerimaan pajak
- H<sub>5</sub> : Pengendalian korupsi memperkuat pengaruh nilai kurs terhadap penerimaan pajak

**METODE**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari *World Bank Data*. Penelitian ini hanya berfokus pada negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) dengan periode penelitian 2011 s.d 2019. Tabel 2 menunjukkan variabel dependen dan independen yang dipilih dalam penelitian ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Tabel

Variabel Dependen	Satuan	Skala Data	Transpormasi Data
<b>Penerimaan Pajak</b>	Persen	Rasio	-

  

Variabel Independen	Satuan	Skala Data	Transpormasi Data
<b>Sektor Agrikultur</b>	Persen	Rasio	-
<b>Nilai Kurs</b>	-	Rasio	-
<b>Pengendalian Korupsi</b>	Poin	Rasio	-

Sumber: data diolah

Pada penelitian ini, metode statistik yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model penelitian regresi linier berganda dengan data panel. Terdapat tiga jenis pemodelan dalam regresi linier berganda dengan data panel, yaitu *common/pooled model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Baltagi, 2005). Untuk menentukan model terbaik yang dapat memberikan informasi hubungan antar variabel maka dilakukan tes pemilihan model. Tabel 3 akan menunjukkan tes pemilihan panel.

Setelah sudah ditentukan model terbaik, maka akan dilakukan tes asumsi klasik. Tujuan dilakukannya tes ini adalah untuk memastikan bahwa model yang sudah ditentukan dapat digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai variabel dependen dari nilai yang diketahui dari variabel independen (Gujarati, 2006). Tabel 4 menunjukkan Uji Asumsi Klasik.

Tabel 3. Tes Pemilihan Model Panel

Uji Model Panel	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
<b>Tes LM BP</b>	Model pooled/ common lebih baik daripada Random	Model Random lebih baik daripada Model Pooled/ common
<b>Tes Chow</b>	Model pooled/ common lebih baik daripada Fixed	Model Fixed lebih baik daripada Model Pooled/ common
<b>Tes Hausman</b>	Model Random lebih baik daripada Fixed	Model fixed lebih baik daripada Random

Sumber: data diolah

Tabel 4. Tes Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
<b>Long Run Normalitas Test</b>	Data terdistribusi normal	Data tidak berdistribusi normal
<b>Uji White</b>	Varian data Homokedastis	Varian data Heterokedastis
<b>Uji Korelasi LM</b>	Model Non-Autokorelasi	Model Autokorelasi

Sumber: data diolah



Setelah model terbaik sudah dipilih dan memenuhi asumsi klasik, selanjutnya adalah menguji kebaikan model (Walpole, 2012). Tabel 5 akan menunjukkan kebaikan tes model. Setelah semua kriteria. pengujian model terpenuhi, interpretasi persamaan regresi yang terbentuk dilakukan.

Tabel 5. Tes Kebaikan Model

Tes Kebaikan Model	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif	Tolak Ho
Koefisien Determinasi Uji/ adjusted R square	R square > 0,5		
Tes Simultan / Tes F	Model Tidak fit/ Semua variabel tidak berpengaruh	Model fit / variabel memiliki efek yang signifikan	minimal 1 Prob. Nilai < 0,05
Tes Parsial / Uji T	Variabel independen tertentu berpengaruh	Variabel independen tidak berpengaruh	Prob. Nilai < 0,05

Sumber: data diolah

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode penelitian. Tabel 6 menunjukkan analisis deskriptif. Tabel 7 menunjukkan analisis deskriptif nilai rata-rata variabel antar negara.

Tabel 6. Analisis Deskriptif

Deskriptif	Penerimaan Pajak	Sektor Agrikultur	Nilai Kurs	Pengendalian Korupsi
Mean	17.63922	6.97156	26.3924	-0.3786398
Standard Deviation	6.028291	5.316317	25.72412	0.3328066
Minimum	9.183122	1.884542	1.672829	-1.06502
Maximum	27.34278	17.19197	70.42034	0.165902

Sumber: data diolah

Tabel 7. Analisis Deskriptif Nilai Rata-Rata Variabel antar Negara

Deskriptif	Penerimaan Pajak	Sektor Agrikultur	Nilai Kurs	Pengendalian Korupsi
Brazil	21.03836	4.441791	2.860316	-0.260123
Cina	18.00357	8.219148	6.474228	-0.334859
India	10.96123	16.63577	61.66819	-0.367713
Rusia	11.82836	3.398638	49.3533	-0.928834
Afrika Selatan	26.36456	2.162447	11.60595	-0.00167

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 6 dan 7, rata-rata persentase penerimaan pajak terhadap PDB di negara BRICS adalah 17.63 persen. Nilai persentase penerimaan pajak tertinggi adalah 27.34 persen di negara Afrika Selatan pada tahun 2015 dan terendah adalah 9.18 persen di negara Rusia pada tahun 2016. Negara yang memiliki persentase penerimaan pajak diatas rata-rata adalah Afrika Selatan, Brazil dan Cina sedangkan dibawah rata-rata adalah India dan Rusia. Rata-rata kontribusi sektor agrikultur terhadap PDB di negara BRICS adalah 6.97 persen. Nilai kontribusi agrikultur tertinggi adalah 17.19 persen di negara India pada tahun 2011 dan terendah adalah 1.88 persen di negara Afrika Selatan pada tahun 2019. Negara yang memiliki kontribusi



sektor agrikultur diatas rata-rata adalah Cina dan India sedangkan dibawah rata-rata adalah Afrika Selatan, Brazil dan Rusia. Rata-rata nilai kurs di negara BRICS adalah 26.39. Nilai kurs tertinggi adalah 70.42 di negara India pada tahun 2011 dan terendah adalah 1.67 di negara Brazil pada tahun 2011. Negara yang memiliki nilai kurs diatas rata-rata adalah India dan Rusia sedangkan dibawah rata-rata adalah Afrika Selatan, Brazil dan Cina. Rata-rata indeks pengendalian korupsi di negara BRICS adalah -0.37 poin. Nilai indeks pengendalian korupsi tertinggi adalah 0.16 poin di negara Brazil pada tahun 2011 dan terendah adalah -1.06 poin di negara Rusia pada tahun 2011. Negara yang memiliki indeks pengendalian korupsi diatas rata-rata adalah Afrika Selatan, Brazil, Cina dan India sedangkan dibawah rata-rata adalah Rusia.

Persyaratan dalam model regresi adalah tidak ada hubungan/ multikolinearitas tinggi antara variabel independen. Persyaratan ini dapat dilihat dari nilai *Variant Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Tabel 8 menunjukkan hanya variabel korupsi yang memiliki nilai VIF kurang dari sepuluh. Artinya, semua variabel independen yang digunakan dalam model terdapat hubungan/ multikolinearitas tinggi. Tetapi, penelitian ini menggunakan data panel sehingga masalah multikolinearitas secara teknis sudah tidak ada, mengingat penggabungan data *cross section* dan *time series* merupakan salah satu *rule of thumb* (Gujarati, 2006)

Tabel 8. Uji Multikolinearitas Variabel Independen

Variabel	VIF
Sektor Agrikultur	16.13
Nilai Kurs	16.85
Pengendalian Korupsi	5.83

Sumber: data diolah

Tabel 9. Tes Pemilihan Model Panel

Ujian	Prob. Nilai	Kesimpulan
Tes LM BP	1.0000	Model Common / Pooled lebih baik daripada Model Random
Tes Chow	0.0000	Model Fixed lebih baik daripada Model Common / Pooled
Tes Hausman	0.2830	Model Random lebih baik daripada Model Fixed

Sumber: data diolah

Sebelum melanjutkan menganalisis modeling pada analisis regresi linier berganda dengan data panel, pada tabel 9. Tes Pemilihan Model Panel dilakukan pemilihan model dengan menggunakan tes yang disebutkan pada bagian metodologi. Model panel yang dipilih tidak dapat ditafsirkan secara langsung tetapi harus diuji untuk asumsi klasik. Asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tabel 10 menunjukkan bahwa semua tes asumsi klasik terpenuhi. Nilai probabilitas lebih signifikan dari 0.05.

Tabel 10. Tes Asumsi Klasik

Ujian	Prob. Nilai	Kesimpulan
<i>Long Run Normalitas Test</i>	0.0000	Data tidak terdistribusi normal
Uji White	0.0497	Varian data Heterokedastis
Uji Korelasi LM	0.3395	Model Non-Autokorelasi

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 8, model yang dipilih adalah *Random Effect Model*. Model tersebut lebih baik dibandingkan model lainnya karena nilai *R-squared* paling besar dan jumlah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen lebih banyak dibandingkan model panel lainnya. Berdasarkan Tabel 9, varian data tidak terdistribusi normal dan terkena efek heterokedastisitas. Berdasarkan teorema limit pusat (*central limit theorem*)



yang menyatakan bahwa jika sampel memiliki jumlah lebih dari 30 ( $n \geq 30$ ), maka distribusi sampel dapat dinyatakan terdistribusi normal (Montgomery & Runger, 2019). Sehingga permasalahan tidak terdistribusi normal dapat diabaikan. Kemudian, dikarenakan *Random Effect Model* yang dipilih maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan GLS (*General Least Square*). Dalam pendekatan GLS (*General Least Square*), uji hetetokedastisitas tidak wajib dilakukan karena GLS dapat mengatasi terjadinya heterokedastisitas (Setyawan et al, 2019). Tabel 11 menunjukkan hasil dari model final yang digunakan.

Tabel 11. Tes Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	Prob.
C	27.89221	0.5828319	0.000
Agri	-1.404532	0.1725098	0.000
Exch	0.1066081	0.0364385	0.003
Corr	8.442077	1.656929	0.000
AgriCorr	-1.5742	0.3237502	0.000
ExchCorr	0.3066302	0.0611368	0.000
Prob(F-statistic)		0.0000	
Between R-Squared		0.9991	

Sumber: data diolah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 11 di atas, dimana nilai koefisien determinansi sebesar 0.9991. Nilai koefisien ini memiliki arti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 99.9 persen, sisanya 0.1 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Pada uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen bersama-sama memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Hasil ini diidentifikasi oleh nilai probabilitas statistik  $F = 0.00$  lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ . Hasil ini berarti bahwa pemodelan yang dilakukan sesuai.

Berdasarkan uji parsial yang diidentifikasi dengan nilai probabilitas uji t menunjukkan hanya variabel agrikultur saja yang berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penerimaan pajak sedangkan variabel nilai kurs dan pengendalian korupsi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak dengan kata lain hipotesis penelitian diterima, dimana nilai probabilitasnya sebesar  $0.000 < \alpha 0.05$ . Kemudian, interaksi antara agrikultur dan nilai kurs dengan pengendalian korupsi terhadap penerimaan pajak adalah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak selama periode 2011 s.d 2019. Dimana nilai signifikansi interaksi antara Agri dan Corr dan Exch dan Corr terhadap penerimaan pajak adalah  $0.000 < \alpha 0.05$ .

Persamaan regresi terbentuk:  $\text{Pajak} = 27.89221 + (-1.404532) * \text{Agri} + 0.1066081 * \text{Exch} + 8.442077 * \text{Corr} + (-1.5742 * \text{AgriCorr}) + 0.3066302 * \text{ExchCorr}$

### Pembahasan

Sektor agrikultur memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak dengan koefisien sebesar pada -1.404532. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan agrikultur akan mengurangi penerimaan pajak sebesar 1.4045 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Gupta (2007) dan Rodríguez (2018) yang menyatakan agrikultur berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan sektor agrikultur merupakan sektor yang sulit untuk dikenakan pajak dibandingkan sektor industri dan jasa. Di negara berkembang, sebagian besar petani merupakan petani subsisten dimana hasil pertaniannya hanya cukup untuk kebutuhan pribadi atau keluarga sehingga penghasilannya masih dibawah minimal penghasilan untuk dikenai pajak (Gupta, 2007). Kemudian, kurangnya pengetahuan petani dalam membayar atau melaporkan pajak menyebabkan para petani tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Agbeyegbe et al, 2006). Selain itu, perlakuan pajak terhadap sektor agrikultur berupa insentif seperti pengurangan pajak atau tarif perpajakan 0% juga mempengaruhi penerimaan pajak dari



sektor agrikultur (Rodríguez, 2018). Hal inilah yang menyebabkan nilai kontribusi di sektor agrikultur berbanding terbalik dengan penerimaan pajak.

Nilai Kurs memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak dengan koefisien sebesar pada 0.1066081. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan nilai kurs terhadap dollar amerika akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0.1066 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan penelitian Muibi & Sinbo (2015) yang berkesimpulan bahwa nilai kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak. Ketika kurs negara BRICS melemah, maka penerimaan pajak di negara BRICS meningkat. Saat kurs melemah, negara cenderung melakukan ekspor (Setyorani, 2018). Hal ini dikarenakan harga atas barang ekspor menjadi meningkat karena nilai kurs melemah, sehingga para eksportir akan memaksimalkan keadaan ini untuk keuntungan perusahaan. BRICS merupakan gabungan beberapa negara yang bertujuan untuk memimpin perekonomian dunia, salah satunya melalui ekspor (O'Neill et al, 2005). Itulah alasan mengapa walaupun kurs melemah di negara BRICS tetapi penerimaan pajak tetap meningkat karena jumlah ekspor yang dilakukan negara BRICS cukup besar.

Indeks pengendalian korupsi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak dengan koefisien sebesar pada 8.442077. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan nilai pengendalian korupsi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 8.44 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian Arif, I., & Rawat, A. S. (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai pengendalian korupsi maka semakin tinggi penerimaan pajak. Hal ini juga didukung dengan penelitian Attila (2008) dan Tanzi & Davoodi (2000) yang membuktikan bahwa akibat korupsi yang tinggi, kinerja pajak di negara berkembang menjadi sangat rendah. Pengendalian korupsi yang semakin baik tentu akan mengakibatkan reformasi perpajakan sehingga berdampak pada meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerimaan pajak.

Koefisien sektor agrikultur setelah dimoderasi dengan pengendalian korupsi berubah dari -1.40 menjadi -1.57. Hal ini menandakan bahwa sektor agrikultur setelah dimoderasi dengan pengendalian korupsi memiliki pengaruh semakin kuat dan signifikan negatif terhadap penerimaan pajak. Kemudian, Koefisien nilai kurs setelah dimoderasi dengan pengendalian korupsi berubah dari 0.1 menjadi 0.3. Hal ini menandakan bahwa nilai kurs setelah dimoderasi dengan pengendalian korupsi memiliki pengaruh semakin kuat dan signifikan positif terhadap penerimaan pajak. Variabel moderasi indeks pengendalian korupsi mampu memperkuat pengaruh variabel independen sehingga dapat diketahui bahwa pengendalian korupsi di negara BRICS merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pajak. Sebagaimana hasil penelitian Gupta (2007), Attila (2008), Tanzi & Davoodi (2000) dan Thornton (2008) yang menyatakan bahwa Tindakan korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi kinerja penerimaan pajak di negara tersebut.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh sektor agrikultur dan nilai kurs terhadap penerimaan pajak di Negara BRICS dengan variabel moderasi indeks korupsi. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa secara simultan, sektor agrikultur dan nilai kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, sektor agrikultur memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak secara negatif signifikan, sedangkan nilai kurs dan indeks pengendalian korupsi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak secara positif signifikan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif terkait sistem perpajakan di sektor agrikultur agar dapat meningkatkan penerimaan pajak serta pemberdayaan petani agar lebih beralih ke tahap produksi yang lebih



masif dibandingkan subsisten. Selain itu, kebijakan terkait nilai kurs dan pengendalian korupsi juga diperlukan agar penerimaan pajak semakin meningkat.

Untuk penelitian lebih lanjut, dapat ditambahkan variabel independen lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi penerimaan pajak seperti tingkat suku bunga, inflasi atau neraca perdagangan. Pemodelan penerimaan pajak selanjutnya dapat menggunakan model panel lainnya dengan menggunakan efek *common* atau *fixed* dalam model panel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abed, G. T. – Gupta, S. (2002): *Governance, Corruption, & Economic Performance*. Washington, D. C., International Monetary Fund., 2002:
- Akitoby, B. (2014). *Five country cases illustrate how best to improve tax collection*. <https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/022/0055/001/article-A006-en.pdf>
- Alabede, J. O. (2018). Economic Freedom and Tax Revenue Performance in Sub-Saharan Afrika. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2017-0024>
- Arif, I., & Rawat, A. S. (2018). Corruption, governance, and tax revenue: evidence from EAGLE countries. *Journal of Transnational Management*, 23(2-3), 119-133.
- Asai, M., & Malgioglio, S. (2019). *As incomes rise, farm employment drops*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/opendata/incomes-rise-farm-employment-drops>
- Attila G. (2011). *Corruption, taxation and economic growth: Theory and evidence*. Etudes et Documents E 2008.29. Clermont, France: Clermont Université, Université de Clermont I, CERDI-CNRS
- Agbeyegbe, T., Stotsky, J., & WoldeMariam, A. (2006). Trade liberalization, exchange rate changes, and tax revenue in Sub-Saharan Africa. *Journal of Asian Economics*, 17(2), 261–284.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third)*. John Wiley & Sons Ltd
- Bluman, Allan G. (2009). *Elementary Statistics: A Step by Step Approach*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Castro, G. Á., & Camarillo, D. B. R. (2014). Determinants of tax revenue in OECD countries over the period 2001-2011. *Contaduria y Administracion*, 59(3), 35–59. [https://doi.org/10.1016/s0186-1042\(14\)71265-3](https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)71265-3)
- Castañeda Rodríguez, V. M. (2018). Tax determinants revisited. An unbalanced data panel analysis. *Journal of Applied Economics*, 21(1), 1-24.
- Chaudhry, Imran Sharif, and Farzana Munir. (2010). "Determinants of low tax revenue in Pakistan." *Pakistan Journal of Social Sciences* 30.2 (2010): 439-452.
- Chelliah, R. J., Baas, H. J., & Kelly, M. R. (1975). Tax Ratios and Tax Effort in Developing Countries, 1969-71. *Staff Papers - International Monetary Fund*, 22(1), 187. <https://doi.org/10.2307/3866592>
- Economic Research Service. (2017). *Low-income countries had the highest rate of agricultural growth, but middle-income countries had the highest rate of productivity growth*. US Department of Agriculture. <https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=85381>
- Eurostat. (2023). *Tax revenue statistics*. Statistics Explained. [https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tax\\_revenue\\_statistic\\_s#General\\_overview](https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tax_revenue_statistic_s#General_overview)
- Ferdiawan, M. A. (2015). Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2005–2014. Di akses pada 15 Mei 2016. *J. Mhs. Perpajak*, 5(2).



- Gaalya, M. S. (2015). Trade Liberalization and Tax Revenue Performance in Uganda. *Modern Economy*, 06(02), 228–244. <https://doi.org/10.4236/me.2015.62021>
- Ghura, D. (1998). Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption. *IMF Working Papers*, 98(135), 1. <https://doi.org/10.5089/9781451855685.001>
- Gujarati, Damodar. (2006). Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- Gupta, A. S. (2007). *Determinants of tax revenue efforts in developing countries*.
- Hawksworth, J. (2006). The world in 2050. PriceWaterHouseCoopers.
- Huňady, J., & Orviská, M. (2015). The effect of corruption on tax revenue in OECD and Latin America countries. *Theoretical and Practical Aspects of Public Finance*, 1(1), 80.
- Kuncoro. Mudrajad. (2009). *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahdavi, S. (2008): The Level and Composition of Tax Revenue in Developing Countries: Evidence from unbalanced panel data. *International review of Economics and Finance*, vol. 17. pp. 607-617.
- Mankiw, N. G. (2018). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publisher
- McCampbell, M. (2022). Agricultural digitalization and automation in low- and middle-income countries: Evidence from ten case studies. *FAO Agricultural Development Economics Technical Study*, 25. <https://doi.org/10.4060/cc2914en>
- Mispiyanti, M., & Kristanti, I. N. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 23-37.
- Montgomery, D. C., Runger, G. C. (2019). *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 7th Edition Asia Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons, Limited.
- Neog, Y., & Gaur, A. K. (2021). Shadow economy, corruption, and tax performance: A study of BRICS. *Journal of Public Affairs*, 21(2), e2174.
- O’Neill, J., Wilson, D., Purushothaman, R., & Stupnytska, A. (2005). Global economics paper no: 134. *How solid are the BRICs*.
- OECD. (2023). *Tax Revenue*. OECD. <https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#>
- Prasetyowati, H., & Panjawa, J. L. (2022). Teknologi Dan Distribusi Pajak Mendukung Kualitas Pembangunan Manusia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 23-36.
- Saibu, Olufemi Muibi, and Sinbo O. Olatunbosun. (2013). "Macroeconomic determinants of tax revenue in Nigeria (1970-2011)."
- Setyawan, A., Hadijati, M., & Switrayni, N. W. (2019). Analisis masalah heteroskedastisitas menggunakan generalized least square dalam analisis regresi. *Eigen Mathematics Journal*, 61-72.
- Setyorani, B. (2018). Pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan jumlah uang beredar di indonesia. In *Forum Ekonomi* (Vol. 20, No. 1, pp. 1-11).
- Smith, A. (2023). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. BoD–Books on Demand.
- Tanzi, V. (1992). Structural factors and tax revenue in developing countries: A decade of evidence. Dalam I. Goldin & L. A. Winters (Ed.), *Open Economies* (1 ed., hlm. 267–285). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628559.023>
- Tanzi, V., & Davoodi, H. R. (2002). Corruption, growth, and public finances. *Governance, corruption, and economic performance*, 197-222.
- Thornton, J. (2008): Corruption and the Composition of Tax Revenue in Middle East and African Economies. *South African Journal of Economics*, vol 76, no. 2. pp. 316-320.



- Todaro, Michael. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Walpole, R. E. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists*. Pearson
- Wijaya, J. H., & Asy'ari, N. M. (2023). PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PERIODE 2017-2021. *Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal)*, 16(2), 132-141.
- Wilson, D., & Purushothaman, R. (2003). *Dreaming with BRICs: The path to 2050*, by Dominic Wilson and, Goldman Sachs Global Economics Paper No. 99, October 2003. <http://www2.goldmansachs.com/insight/research/reports/report6.html>
- World Bank. (2023). *Agriculture Overview*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview>
- World Bank. (2023). *Tax and Government Revenue*. <https://www.worldbank.org/en/topic/taxes-and-government-revenue#1>